

**PERENCANAAN PROGRAM-PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM
PENCAPAIAN TARGET MDGs TAHUN 2015 DI KOTA BATU****Saiful Ludoni, Irwan Noor dan Luqman Hakim**

Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang

email: renofernando99@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is first, to describe and analyze the poor households economics condition and the existing programs for poverty alleviation to reach Millenium Development Goals targets in Batu City on 2015. Secondly, to describe and analyze the available options for the SKPD (government's Agency) in planning the programs for city's poverty eradication Strategy to reach the MDGs target 1: eradicate poverty and extreme hunger. The conclusion of this study are as follows: (1) the planning of programs on poverty eradication strategy is designed with the top down and bottom up approaches to implement the economics, social and ecology developments in eradicating poverty and extreme hungers in batu city. (2) Programs and activities to eradicate poverty in Batu City were prepared by Vision - Mission - Goals, the strategic issues that had been developed previously by United Nations through its Millenium Development Goals and also by the indonesian Government. The Batu City Government should keep up the good work on MDGs achievements and plan on both permanent and ad-interim poverty eradication programs, so the acceleration of targets achievement on MDGs 2015 and Sustainable Development Goals 2030 can be attained on time. (3) the supporting factor for the eradication of poverty in Batu city is the government's longstanding commitment to eradicate poverty and extreme hunger, Recommendations that can be delivered to synchronize the implementation of poverty alleviation programs with mechanisms, procedures and rules of the municipality system are implemented by reviewing the planning of the programs for the city poverty eradication strategies and take a closer look to the problems and root causes of the poverty alleviation problems.

Keywords: *eradicate Poverty, extreme hunger, MDGs.*

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah: pertama, Mendeskripsikan dan menganalisa perencanaan program pengentasan kemiskinan dalam meraih target Millenium Development Goals di kota batu. Kedua, Mendeskripsikan efektifitas dan efisiensi upaya Penanggulangan Kemiskinan yang sudah dilaksanakan pemerintah kota batu. Ketiga, Menganalisa opsi-opsi yang dapat diimplementasikan pemerintah kota batu dalam Pemberdayaan masyarakat agar bisa lepas dari kondisi Kemiskinan sesuai target MDGs pada tahun berjalan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Perencanaan program-program strategi Pengentasan Kemiskinan dirancang dengan menggunakan pendekatan *top down* dan *bottom up* dalam upaya mengimplementasikan pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi terkait Pengentasan Kemiskinan dan kelaparan kronis di Kota Batu. (2). Program dan kegiatan yang untuk mengentaskan Kemiskinan Kota Batu disusun berdasarkan Visi – Misi - Tujuan, isu strategis yang telah disusun sebelumnya oleh PBB melalui *Millenium Development Goals*-nya dan juga oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Kota Batu harus tetap menjaga pencapaiannya yang baik pada realisasi target MDGs dan merencanakan baik pada program pengentasan kemiskinan yang permanen maupun ad-interim, sehingga akselerasi pencapaian target MDGs 2015 dan SDGs 2030 dapat tercapai tepat waktu.(3). Faktor pendukung bagi Pengentasan Kemiskinan di Batu adalah komitmen jangka panjang Pemerintah kota Batu untuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem. Rekomendasi yang dapat disampaikan bagi sinkronisasi implementasi program pengentasan kemiskinan dengan mekanisme, prosedur dan aturan pemerintah kota dilakukan dengan meninjau ulang perencanaan program-program-program strategi pengentasan kemiskinan kota dan melihat lebih dekat pada masalah dan akar-akar masalah pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: *Pengentasan Kemiskinan, Kelaparan Kronis, MDGs*

PENDAHULUAN

Visi tentang *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan impian dan komitmen masyarakat Global yang disepakati oleh 189 Kepala Negara dan Pemerintahan dalam Sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) untuk lebih menyejahterakan masyarakat dunia melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, penyediaan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perbaikan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. 8 goals menjadi komitmen MDGs untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara (*right based approach*) yang bersifat universal, legal dan berlaku untuk semua warga Negara. Pemenuhan hak dasar ini sejalan dengan konsep etika politik dengan gagasan pokok berupa penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang diadopsi oleh anggota seluruh PBB. 8 komitmen MDGs meliputi Tujuan-tujuan Pembangunan Millenium sebagai berikut 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ekstrem (*eradicate poverty and extreme hunger*), 2. Menyediakan pendidikan dasar untuk semua (*achieves universal primary education*), 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan (*promote gender equality and empower women*), 4. menurunkan angka kematian anak (*reduce child mortality*), 5. meningkatkan Kesehatan Ibu (*improve maternal health*), 6. memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (*combat HIV/AIDS, malaria and other diseases*), 7. memastikan kelestarian lingkungan hidup (*ensure environmental sustainability*) dan terakhir Tujuan ke 8 yakni membangun kemitraan global untuk pembangunan (*develop a global partnership for development*).

Dunia masih menyisakan paradoks, Negara-negara maju melakukan industrialisasi dan menikmati pertumbuhan ekonomi serta modernisasi, sementara di Negara-negara berkembang dan terbelakang masih merasakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, 4 dari 5 penduduk dunia tidak memiliki jaminan sosial apapun dan lebih dari 1,3 milyar manusia tidak memiliki akses terhadap perawatan kesehatan. 10 juta bayi meninggal setiap tahun akibat penyakit yang bisa dicegah dan 536.000 wanita hamil meninggal saat kehamilan atau melahirkan, baik karena tidak adanya perawatan medis yang memadai, maupun akibat ketidakmampuannya membayar pelayanan kesehatan yang ada. Tragedi ini tidak terjadi di Negara-negara modern yang memiliki sistem perlindungan sosial (*social protection*) yang baik, yang melindungi warganya dari resiko-resiko kehidupan yang senantiasa mengancam detik demi detik (*Suharto: 2009*). Perlindungan sosial merupakan sarana yang sangat penting untuk mereduksi dampak kemiskinan, walaupun bukan satu-satunya pendekatan dalam pengentasan kemiskinan, bila dikombinasikan dengan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan yang terintegrasi, maka akan dapat mendorong akselerasi pembangunan dan *economic growth*. Tujuan MDGs menempatkan sumber daya manusia sebagai fokus pembangunan yang tujuan akhirnya ialah mencapai kesejahteraan masyarakat.

Mayoritas manusia menginginkan hidup yang jauh di atas standar kemiskinan universal dan regional, hanya sedikit sekali jumlah penduduk yang secara suka rela menjalani hidup di dalam pola

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 6, No. 1, 2016

yang termasuk dalam lingkup kategori kelompok miskin, biasanya mereka bersedia hidup dalam kondisi miskin Karena faktor kepercayaan dan keagamaan, seperti penganut sufisme dan biksu-biksu yang *daily life style*-nya menjauhi kemewahan. Dalam kamus ilmiah populer(*kbbi.web.id*), kata “Miskin” mengandung makna tidak memiliki harta yang cukup (harta yang dimiliki tidak dapat mencukupi kebutuhan pemiliknya), hidup serba kekurangan (memiliki penghasilan sangat rendah). Sementara fakir diartikan sebagai orang yang sangat miskin atau hidupnya dalam kondisi *extreme poverty*. Seiring perkembangan zaman dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan definisi kemiskinan yang awalnya hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan, hingga menjadi pengertian yang lebih luas dan selanjutnya juga memasukkan komponen sosial dan moral. *Ambar(2004:27)* mengemukakan bahwa konsep kemiskinan bersifat multidimensional, sehingga untuk menyelesaikan masalah dan akar masalah kemiskinan hendaknya juga meliputi seluruh aspek yang melekat pada kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya mencakup kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidak berdayaan (*powerless*), tertutupnya akses terhadap berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar dan kemiskinan yang terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi kepada generasi berikutnya. *Bakhit et al (2001:4)* menyatakan bahwa kemiskinan adalah persoalan yang sangat kompleks. Kemiskinan ditinjau dari sudut pandang mekanis merupakan refleksi rendahnya tingkat pendapatan, akan tetapi pada perekonomian subsisten, tingkat pendapatan saja tidak dapat dijadikan ukuran kemiskinan yang sah. Lebih jauh lagi, kemiskinan dapat juga dipandang sebagai deprivasi dalam arti rendahnya akses terhadap sumberdaya atau karena hidup di alam yang kondisinya buruk atau rusak, serta ketidak mampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. *Sumodiningrat (1999:3)* menyatakan klasifikasi kemiskinan dengan melihat pola waktu individu ataupun *households* menjadi miskin, yang pertama adalah *chronical poverty* yang berlangsung turun temurun (*persistent poverty*), kedua kemiskinan yang dipengaruhi oleh pola siklus ekonomi secara keseluruhan (*cyclical poverty*), ketiga, kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus-kasus nelayan di pesisir pantai dan petani tanaman pangan (*seasonal poverty*), keempat, kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan (*accidental poverty*). Kemiskinan merupakan gambaran sebuah kondisi konsumsi individu yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk parameter makanan dan non makanan, ada deskripsi parameter kemiskinan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*) yang dijadikan acuan dalam menilai standar kemiskinan. parameter lain yang digunakan dalam mendeskripsikan Garis kemiskinan dipaparkan dalam jumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kalori per orang per hari, tapi sebagian orang menilai parameter ini secara subyektif dan komparatif,

Terdapat empat bentuk kemiskinan yang mana setiap bentuk memiliki arti tersendiri, Keempat bentuk tersebut adalah kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif yang melihat kemiskinan dari segi pendapatan, sementara kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural yang melihat kemiskinan dari segi penyebabnya. (1). *Kemiskinan absolut* adalah apabila tingkat pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan minimum, seperti kebutuhan sandang,pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas agar bisa hidup layak dan bekerja produktif. (2). *Kemiskinan relative* berkaitan dengan kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas *poverty line*, namun relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya. (3). *Kemiskinan struktural* berkaitan dengan kondisi maupun situasi si miskin akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum tersebar merata menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan mereka. (4). *Kemiskinan kultural* berkaitan dengan masalah *mindset*, sikap dan perilaku seseorang atau masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, gaya hidup boros, dan rendahnya kreatifas, meskipun ada usaha dari pihak eksternal untuk membantunya agar bisa keluar dari masalah kemiskinan.

Beberapa faktor Penyebab Kemiskinan antara lain:(a) *faktor individual* atau patologis yang merefleksikan kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan yang dimiliki oleh si miskin,(b) faktor keluarga yang menghubungkan kemiskinan sebagai dampak dari pendidikan di keluarga. (c). faktor sub-budaya (*subcultural*) yang menggambarkan kemiskinan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari yang dipelajari dan dijalankan dalam lingkungan sekitar. (d). Faktor agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari dampak dari aksi orang lain, misalnya karena adanya perang, peraturan pemerintah dan kebijakan moneter maupun ekonomi makro. (e). faktor struktural yang memberikan justifikasi bahwa kemiskinan merupakan dampak dari struktur sosial yang secara hierarkis telah menempatkan orang berpenghasilan terendah dan memiliki nilai asset terendah dapat diklasifikasikan dalam kelompok miskin.

Suharto (2009:5) mengemukakan bahwa di Indonesia terdapat anggapan umum bahwa kemiskinan hanya bisa diberantas melalui implementasi program-program pemberdayaan masyarakat seperti pemberian kredit modal usaha dengan *low interest* untuk membuka warung kecil di sudut kampung, pemberian bantuan ternak sapi atau kambing dan pelatihan keterampilan perbengkelan atau kerajinan tangan. Analoginya jika orang-orang miskin diberi modal dan dilatih, maka mereka akan mendapatkan kesejahteraan lebih baik dan tidak miskin lagi. Banyak *Policy Makers*, akademisi, politisi dan masyarakat awam yang memusuhi program-program pengentasan kemiskinan yang berbentuk perlindungan sosial seperti kebijakan transfer uang atau barang, seperti BLT, BOS, BSM, Raskin, dan program Keluarga Harapan (PKH), padahal skema *cash and in-kind transfer* seperti itu sudah banyak diterapkan di Negara-negara lain seperti US, Australia, new zeland, prancis, jerman,

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 6, No. 1, 2016

portugis, brazil dan lain-lain. Di Afrika selatan telah dirancang program *Basic Income Grant (BIG)* seperti BLT di Indonesia, dimana Negara memberikan transfer uang kepada orang miskin sebesar \$10 perbulan. Kritik dari penentang program ini dari ilmuwan sampai media massa yang berasumsi umum, *taken for granted*, dan tidak didasari studi mendalam, bahwa 1. program BIG akan menyebabkan ketergantungan dan kemalasan serta menimbulkan kebusukan moral masyarakat. 2. Bantuan sebesar \$10 perbulan perkapita dianggap terlalu kecil dan tidak akan mampu membuat perbedaan apapun pada penerima pelayanan. Para pekerja sosial pendukung program BIG sebaliknya memberikan argument mengenai strategi bertahan hidup */survival strategies* yang dilakukan oleh orang miskin. Orang yang hidup dalam kemiskinan umumnya tinggal dalam keluarga besar, jika satu keluarga memiliki 10 orang anggota keluarga yang tidak bekerja sama sekali, artinya mereka tidak memiliki pendapatan untuk menopang kehidupannya sampai akhir bulan. Tanpa pendapatan maka mereka tidak dapat membeli Koran yang memuat lowongan kerja, menelpon dan membayar transportasi umum untuk menghadiri wawancara kerja. Ketika program BIG berjalan maka mereka mendapatkan bantuan sosial perkapita \$10 perbulan, sehingga total bantuan yang diterima satu keluarga tersebut sebesar \$100 perbulan. Dengan uang itu mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan sebagian dapat menggunakannya untuk mendapatkan akses terhadap kehidupan kerja sehingga penerima bantuan sosial dapat menjadi orang yang produktif dan bertanggung jawab. Program seperti BLT dan Raskin memang tidak akan mampu menghilangkan kemiskinan, program ini diibaratkan seperti obat penawar sakit kepala. Program ini dapat mengurangi dampak kemiskinan dan ketidak berdayaan kelompok *grass root*.

Tujuan, Target dan Indikator MDGs yang berkaitan langsung dengan Pengentasan Kemiskinan

Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan (<i>eradicate extreme poverty and hunger</i>)	
Target 1:	penurunan proporsi penduduk yang memiliki tingkat pendapatannya di bawah \$1 per hari menjadi setengahnya pada periode antara 1990–2015.
Indikatornya:	1. penurunan Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional 2. penurunan Proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari 3. penurunan Rasio kesenjangan kemiskinan 4. penurunan Kontribusi kuantil termiskin terhadap konsumsi nasional
Target 2:	penurunan proporsi penduduk yang menderita kelaparan parah menjadi setengahnya dalam periode antara tahun 1990–2015.
Indikatornya:	5. peningkatan Prevalensi balita yang mengalami masalah kurang gizi (BKG) 6. Proporsi penurunan jumlah penduduk yang berada di bawah garis konsumsi minimum (2100 kilo kalori per kapita per hari)

Sumber: <http://ryoshiromibu.blogspot.com>

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) berisi Delapan tujuan, dengan 18 target dan 48 indikator yang harus dicapai, dengan harapan realisasinya dapat membantu tercapainya kesejahteraan masyarakat umum pada generasi saat ini dan generasi mendatang. Implementasi MDGs tergantung pada masing-masing negara yang menggunakan Tujuan, target dan indikator MDGs untuk mengukur tingkat kemajuannya. Indikator global tersebut bersifat fleksibel bagi masing-masing negara. Khusus tujuan 1 menggunakan Angka *standard of Income for poverty* sebesar 1 USD sebagai batas penghasilan perhari yang masuk kategori sangat miskin.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan di lapangan untuk selanjutnya dicarikan opsi-opsi pemecahan masalahnya melalui studi literatur, *lessons learned*, *best practices* dan lainnya. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana program pengentasan kemiskinan bagi pencapaian target MDGs di kota batu dapat mencapai sasaran dan sesuai dengan *deadline* program yakni tahun 2015. Fokus Penelitian ini pada pendeskripsian dan analisis terhadap: (1). Perencanaan program-program SKPD Pemerintah Kota Batu yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap upaya pengentasan kemiskinan yang telah diimplementasikan. (2). Kehidupan ekonomi *poor households* terkait adanya intervensi pemerintah melalui pemberian bantuan atau program pengentasan kemiskinan SKPD Pemerintah Kota Batu, dalam perspektif *inputs*, proses, *outputs*, *outcomes* dan *benefits* dari *poverty alleviation programs*. Dalam penelitian ini, peneliti mengikuti langkah-langkah seperti yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman (Sugiono, 2008: 21) yaitu : (1) reduksi data, (2) display data, dan (3) pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah berhasil dikumpulkan melalui kunjungan ke SKPD, Rumah Tangga Miskin dan perpustakaan, selanjutnya melalui proses reduksi data sehingga data yang penting dan benar-benar relevan dengan penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar, maupun deskripsi yang bisa memberikan informasi dan dapat digunakan untuk membantu proses verifikasi dan pengambilan Kesimpulan Penelitian. Penelitian dilaksanakan selama 8 bulan, mulai bulan 1 november 2014 sampai 30 juni 2015. Diawali dengan *Library Research* yang dilakukan secara riil maupun virtual untuk mendapatkan data dan informasi awal tentang konsep kemiskinan dan *Millenium development goals*, selanjutnya dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder di lapangan tentang implementasi program penanggulangan kemiskinan di wilayah kerja Pemerintah Kota Batu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Batu Memiliki wilayah seluas 197,087 km² yang dibagi dalam 3 wilayah kecamatan (Batu, Junrejo, dan Bumiaji), 5 kelurahan, dan 19 desa, dengan jumlah penduduk 196.189 jiwa (2013). Semua desa/kelurahan di Kota Batu dipimpin oleh kepala desa/lurah yang berjenis kelamin laki-laki. Di Kecamatan Batu terdapat empat kelurahan dan empat desa. Sementara di Kecamatan Junrejo

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 6, No. 1, 2016

terdapat satu kelurahan dan enam desa. Kecamatan Bumiaji memiliki desa terbanyak dibanding dengan dua kecamatan lainnya, sembilan desa.

Angka kemiskinan di Kota Batu dilaporkan mengalami tren penurunan sebagai dampak implementasi beberapa program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah Kota Batu, diantaranya Raskin, bedah rumah, Bantuan siswa miskin dan lain-lain. Beberapa tantangan harus dihadapi untuk merealisasikan Tujuan Pembangunan Millenium yang pertama yakni menurunkan setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 per hari dalam kurun waktu 1990-2015, tantangan pertama yakni, bagaimana meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan usaha ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat beserta pencapaian pemerataan pembangunan. Tantangan kedua adalah bagaimana meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kegiatan sosial termasuk peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, seperti tenaga lapangan yang terdidik dan terlatih serta memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Tantangan ketiga adalah bagaimana meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kebutuhan dasar (indikator kemiskinan non pendapatan) seperti kecukupan konsumsi pangan (kalori), layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi . Tantangan ke empat adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan masyarakat (*high involvement*) terutama kelompok miskin agar ikut serta dalam pelaksanaan dan pengawasan program-program pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, Perbandingan Penduduk Miskin (yakni miskin dan mendekati miskin) terhadap Jumlah Penduduk Kota Batu dari tahun 2010 terus mengalami penurunan yaitu untuk tahun 2010 mencapai sebesar 5,11 persen, tahun 2011 sebesar 4,74 persen, tahun 2012 sebesar 4,45. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,30 % menjadi 4,75 persen. Kenaikan persentase kemiskinan di Kota Batu tahun 2013 ini banyak dipicu oleh faktor eksternal yang relatif sulit dikendalikan. Terutama disebabkan oleh gejolak ekonomi nasional dan global. Namun secara keseluruhan angka ini sudah berada di bawah standar provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 mencapai 13,08 %.

Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan (GK) di Kota Batu Tahun 2011 – 2013

No	Tahun	GK (Rp/Kap/bln)	% Penduduk Dibawah GK
1	2011	280.330	4,74
2	2012	306.780	4,45
3	2013	336.844	4,75

Sumber: Bapeda Kota Batu

Hasil Kesepakatan Rakor TKPKD Kota Batu pada Tanggal 27 Pebruari 2013, telah dirumuskan 16 indikator kemiskinan yang dapat dijadikan pegangan bagi SKPD Kota Batu dalam menetapkan garis kemiskinan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Luas bangunan (*kurang dari 8 meter persegi per orang*);
2. Jenis lantai (*tanah / bambu / kayu murahan*);
3. Jenis dinding (*bambu/ rumbia / kayu kualitas rendah / tembok tanpa plester*);
4. Fasilitas buang air besar (*tidak memiliki sendiri / bersama-sama rumah tangga lain*);
5. Kebutuhan air bersih minimal 60 liter / orang / hari;
6. Sumber penerangan listrik menyalur / mengambil tetangga;
7. Jenis bahan bakar untuk memasak (*kayu bakar / arang / minyak tanah*);
8. Frekuensi membeli daging, ayam dan susu dalam seminggu (*hanya satu kali / tidak pernah*);
9. Frekuensi makan sehari (*1-2 kali*);
10. Jumlah stel pakaian baru yang dibeli dalam setahun (*1 stel / tidak pernah*);
11. Tidak mampu berobat ke dokter swasta;
12. Sumber pendapatan dibawah atau sama dengan Rp.600.000,- / bulan / KK;
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga (*Pendidikan kepala rumah tangga maksimal SD / tidak sekolah*);
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang dapat dijual dengan nilai Rp.500.000,- seperti sepeda motor (kredit / non kredit), ternak, kapal motor, emas, atau barang modal lainnya
15. Usia di atas 60 tahun tidak berpenghasilan dan tidak ada yang menanggung;
16. Penyandang difabel / keterbatasan fisik tidak berpenghasilan dan tidak ada yang menanggung.

**Program Pembangunan yang berdampak langsung terhadap
Pengentasan kemiskinan di Kota Batu tahun 2015**

No	Program/ Kegiatan	Input	output	outcomes	benefits
1	Pembagian Beras untuk orang Miskin (RASKIN)	Beras Kualitas Rendah	Terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan)	Peningkatan kesejahteraan	Peningkatan produktifitas
2	Bantuan Tunai Langsung (BTL) untuk lansia terlantar	Conditional Cash Transfers (CCT)	Terpenuhinya kebutuhan dasar	Peningkatan kesejahteraan	Peningkatan produktifitas
3	Program Keluarga Harapan (PKH)	Conditional Cash Transfers (CCT)	Bantuan untuk Rumah tangga sangat Miskin	Peningkatan pendidikan, kesehatan	Peningkatan produktifitas
4	BPJS	Asuransi Kesehatan	Terpenuhinya biaya kesehatan	Peningkatan kesehatan	Peningkatan produktifitas

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 6, No. 1, 2016

5	Pembagian Makanan suplemen untuk ibu hamil dan Bayi	Produk makanan dan Susu	Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan bayi	Peningkatan kesehatan ibu dan bayi	Peningkatan produktifitas
6	Bedah Rumah	Bahan bangunan dan tenaga kerja	Terpenuhinya kebutuhan papan	Peningkatan kesejahteraan	Peningkatan produktifitas
7	Bantuan Siswa Miskin	Conditional Cash Transfers (CCT)	Terpenuhinya kebutuhan <i>Study</i>	Peningkatan kesejahteraan	Peningkatan prestasi

Sumber : Data yang diolah

Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan : Pertama, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan dan dapat dinikmati sebanyak-banyaknya oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, pembangunan sektor-sektor ekonomi di Kota Batu tersebut juga berbasis pada keunggulan atau potensi masing-masing Desa/Kelurahan. Komoditi unggulan (potensial) di sektor pertanian yang dikembangkan di Kota Batu yaitu : a) Budidaya buah : apel, jeruk, alpukat dan strawberry. b) Budidaya sayur mayur : wortel, kubis, kentang, bawang merah, bawang putih, brokoli, tomat, sawi, cabe merah. c) Budidaya tanaman hias : Leli, Anggrek, Mawar, Anthurium, Krisan, Gladiol dan Anyelir. d) Pengembangan peternakan : Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Itik, Ayam, dan Kelinci. Pemerintah Kota Batu telah membuat Rencana pengaturan kawasan pertanian Kota Batu yaitu : (1) Kawasan Sentra Produksi Sayur Mayur, Lokasi di Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo dan Sekitarnya. (2) Kawasan Sentra Produksi Apel, Lokasi di Wilayah Kecamatan Bumiaji. (3) Kawasan Sentra Produksi Bunga, Lokasi di Desa Sidomulyo, Gunungsari, Punten dan Sekitarnya. (4) Kawasan Sentra Produksi Tanaman Pangan, Lokasi di Wilayah Batu Bagian Selatan/Kecamatan Junrejo. Obyek daya tarik wisata wisata buatan seperti Jatim Park, BNS, Museum Satwa, dan perhotelan yang ada di Kota Batu diupayakan agar dapat merekrut tenaga kerja lokal di Desa/ Kelurahan sekitarnya, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kedua, Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/ keberpihakan, yaitu : (a) kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, memutus rantai kemiskinan, mendukung peningkatan kualitas SDM, dan meningkatkan pelayanan dasar khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. (b) Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). (c) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri dan program-program pemberdayaan masyarakat yang ada. (d) Meningkatkan sinkronisasi dan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta harmonisasi antarpelaku dengan meningkatkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan. Ketiga, Peningkatan efektivitas penurunan kemiskinan di wilayah desa dan dusun tertinggal dan terluar (terpencil) Melalui (a). Pemberdayaan sektor pertanian, informal dan UMKM serta koperasi. (b). Pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan melalui agroindustri

berbasis sumberdaya lokal yang didukung oleh pembangunan infrastruktur perdesaan. *Review* dan *Continuous improvement* terhadap program-program yang sudah dan sedang berjalan harus tetap dilakukan untuk menyikapi dan mengatasi kondisi lingkungan internal dan eksternal yang terus berubah, sehingga potensi yang ada di Kota batu dapat dimaksimalkan dan *sustainable*.

Kehidupan Ekonomi *Poor Households* Di Kota Batu.

Setelah melakukan *Field Research* melalui kunjungan, observasi dan *interview* pada *poor households* di Kota batu, maka diperoleh data-data dan informasi tentang kendala pengentasan dilapangan, masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka di antaranya : (1). Di balik gemerlap *shining batu* ternyata masih dijumpai adanya *extreme poverty* di kota wisata batu, diantaranya; a). adanya penderita gangguan jiwa bernama Markeso (usia sekitar 60 tahun) yang diduga belum mendapatkan penanganan dari dinas sosial, padahal dia sering tidur dan berkeliaran di sekitar salah satu kantor SKPD pemerintah kota batu. b). adanya beberapa orang tua yang tinggal sendirian di rumah dan memiliki *income* yang sangat rendah, seperti wanita tua yang berprofesi sebagai pemulung di dresel oro-oro ombo yang *weekly income*-nya hanya sekitar Rp 25.000, sehingga untuk makan saja dia sangat bergantung pada belas kasihan tetangganya yang juga masuk kategori rentan miskin. (2). Program Beras untuk orang miskin (Raskin) masih menyisakan persoalan pada aspek distribusi, kuantitas dan kualitasnya. Masih dijumpai bahwa beras yang khusus dijual kepada orang miskin ini ternyata juga dibeli oleh kelompok masyarakat yang tidak masuk skala prioritas. Agar beras raskin jadi lebih layak dikonsumsi, sebagian warga menambah harga beli Rp 500/kg dengan kompensasi mendapatkan beras yang dipoles lebih putih, sebagian lagi mencampur dengan beras kualitas normal dan atau dengan jagung halus, sebagian warga menggunakan Raskin untuk digoreng menjadi campuran Kopi dan kelompok terakhir mengkonsumsi Raskin untuk makan sehari-hari sesuai dengan kualitas yang diterimanya. Sebagian besar warga mendapatkan harga beras raskin sesuai dengan yang dipatok oleh pemerintah. (3). Sektor pertanian yang menjadi juga memiliki persoalan yang berkaitan dengan kelangkaan pupuk subsidi di pasaran: Za, TSP dan urea yang seringkali sulit ditemui di pasaran paska musim tanam, kadang perlu waktu 20-30 hari untuk mendapatkan pupuk yang dibutuhkan petani. Faktor keamanan di kebun juga masih rawan, sering terjadi modus baru pencurian skala kecil sekitar 20 kg apel yang dilakukan warga dari luar dusun/desa. Kepercayaan terhadap hukum juga masih kurang, sering pencuri yang tertangkap akhirnya dilepaskan oleh kepala dusun dan tidak dilaporkan ke polisi. (4). Faktor keamanan dinilai masih kurang oleh masyarakat di *rural area*, masyarakat di sekitar sumber brantas sering melakukan ronda untuk menjaga warung-warung dipinggir jalan yang sering dibobol oleh pencuri dan isinya dikuras. Ketidakpastian hukum juga masih dijumpai seperti pegawai bengkel motor tradisional yang melakukan pencurian tapi malah dibantu oleh polisi agar lepas dari jerat hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bila menggunakan standar *extreme poverty* dengan pendapatan perhari dibawah US\$ 1, pemerintah kota batu mengklaim *poverty rate* sebesar nol alias tidak ada warga batu yang berpenghasilan di bawah US\$ 1 per hari, namun dari *field research* telah ditemukan 3 warga batu yang mengalami *extreme poverty* dan mengandalkan bantuan pihak eksternal untuk men-*sustain* kehidupannya sehari-hari. Perlu dilakukan relokasi kepada warga yang mengalami *extreme poverty*, dengan menempatkan mereka yang Tua (sebatang kara/tidak ada yang penanggung) ke panti jompo dan yang mengalami gangguan jiwa dikirim ke Rumah Sakit Jiwa.

Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat tahun 2013 yang digunakan untuk membiayai program pembangunan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan sejumlah Rp 3.895.000.000. Anggaran Program bedah rumah Rp 2.500.000.000, masih ada yang belum terserap sebesar Rp 220.000.000. anggaran raskin sebesar 525.000.000 terserap 100%, anggaran ini perlu untuk ditingkatkan karena masih ada warga miskin yang belum menikmati Raskin atau mereka pernah mendapatkan Raskin di awal pendataan saja, setelah itu mereka tidak mendapatkan Raskin dengan alasan keterbatasan jumlah bantuan. Bantuan untuk kematian sebesar Rp 250.000.000 terserap 100%, sedangkan bantuan untuk pengobatan sebesar Rp 620.000.000 hanya terserap Rp 462.492.700 dan tersisa Rp 157.507.300. jumlah selisih penyerapan anggaran Total sejumlah Rp 377.507.300 yang belum terserap untuk bantuan sosial warga kota batu. Masalah pendataan yang kurang valid, koordinasi yang lemah dan sosialisasi yang kurang tepat sasaran menyebabkan manajemen program pengentasan kemiskinan di kota Batu masih menghadapi masalah klasik yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Perlu strategi inovatif untuk memperbaiki sistem pendataan warga miskin, diantaranya dengan melibatkan CPNS untuk melakukan pendataan ulang ke masyarakat, sehingga didapatkan Data Kemiskinan yang lebih valid dan *Reliable*.

Walaupun kota Batu masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mengentaskan kemiskinan, namun secara obyektif kinerja Team penanggulangan Kemiskinan Kota batu dinilai telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Kota batu dinilai telah dapat mencapai target MDGs, karena angka kemiskinan yang tercatat dan dari temuan di lapangan, angkanya mendekati kesesuaian dan telah melebihi target MDGs yang ingin dicapai. Strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif dan telah berhasil dalam mencapai target MDGs 2015 di Kota Batu terdiri dari 3 komponen: (1). Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi kesejahteraan sosial Rakyat Miskin (*pro-poor Growth*) dengan tetap memperhatikan faktor *green economic* sebagai pendorong untuk mencapai *Sustainable Development Goals*. (2). Membuat Layanan Sosial yang Bermanfaat bagi Rakyat Miskin dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan, implementasi, monitoring maupun evaluasi programpengentasan kemiskinan sehingga *input* yang digunakan tidak mubazir tapi dapat menjadi *output*, *outcome* dan *impact* yang bisa memberikan *benefits* bagi seluruh *stakeholders* Pemerintah Kota Batu. (3). Membuat Pengeluaran Pemerintah(*Government Expenditures*) Bermanfaat

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 6, No. 1, 2016

bagi Rakyat Miskin dan bisa memberikan *trickle down effects* pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di level *grass roots* sehingga dapat mereduksi potensi masalah sosial maupun ekologi yang menjadi faktor krusial dalam keseimbangan *framework* trilogi pembangunan daerah dan nasional ke depan.

Tindakan-tindakan yang bisa menjadi skala prioritas untuk dilakukan dengan segera dalam akselerasi pencapaian target MDGs yang efektif di Kota batu adalah dengan mereduksi *barriers and obstacles* pengurai *problem* maupun *the rootcauses of the problems* terkait *poverty alleviation*. tindakan-tindakan itu antara lain: (1). Penyediaan beras yang berkualitas melalui operasi pasar oleh BULOG, kebijakan ini akan dapat menjadi solusi *ad-interim* dalam menjaga *equilibrium* ketersediaan beras di pasar, sehingga *demand* dan *supply* tetap dalam pengawasan pemerintah untuk mewujudkan harga beras layak konsumsi yang *affordable* bagi semua kalangan di masyarakat. Pemerintah juga perlu mengkampanyekan konsumsi pangan non beras seperti jagung, sagu, ketela, ubi jalar dan lain-lain sebagai bahan pangan substitutif dan komplementer untuk mendorong konsumsi kalori minimal 2100 kilo kalori per individu. (2). Melakukan penambahan anggaran di bidang pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pendidikan yang memiliki dampak terhadap perbaikan akses masyarakat terhadap standar hidup layak.(3). Mengembangkan sistem jaminan sosial secara terintegrasi dan komprehensif, yang mampu menangani risik dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan rentan miskin. Sinergi program Kartu Sakti dari pemerintah pusat yakni tiga kartu bantuan sosial: Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, harus mendapatkan dukungan program SKPD terkait agar dapat memberikan *impact* dan *benefit* sesuai yang diharapkan. validasi data kemiskinan dan perbaikan manajemen penyaluran bantuan social harus terus menerus di *up to date* karena kondisi social ekonomi masyarakat batu yang dinamis. (4). Meningkatkan kualitas *law enforcement* dan kesadaran hukum/kapasitas penegak hukum agar tidak lagi membantu Kriminal untuk lepas dari jerat hukum, sehingga dapat tercipta kepastian hukum yang dapat mewujudkan keamanan dan ketentraman masyarakat. (5). Merevitalisasi pertanian melalui program-program pemerintah untuk mengatasi; kelangkaan pupuk dan obat tanaman; dan beredarnya pupuk, bibit tanaman dan obat tanaman palsu yang menjadi masalah yang mengurangi produktifitas pertanian di kota batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, Sabina. Et al, 2013, *Multidimensional Poverty and the Post-2015 MDGs* King's College London February 2013 . OPHI- OXFORD POVERTY & HUMAN DEVELOPMENT INITIATIVE. www.ophi.org.uk
- Ambar, Sulistyani., 2004, *Kemitraan dan Model pemberdayaan*, Gaya Media Jogja
- Bakhit, Izzedin. Et al., 2001, *Menggempur akar-akar Kemiskinan*, diterjemahkan oleh Frederik ruma, YAKOMA-PGI, Jakarta

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 6, No. 1, 2016

Bappeda Kota Batu, 2013, *Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)*.

_____, 2013, *Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Batu 2013*

_____, 2013, *Monitoring dan Evaluasi MDGS Kota Batu 2012*.

_____, 2014, *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2014*.

Conyers, Diana, 1991, *Perencanaan Social Di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*, Diterjemahkan Oleh Susetiawan, Yokyakarta, Gajahmada University Press

Dhani Irawan, *negara* diakses sabtu, 11 oktober 2014, pukul 15:13
m.detiknews.com/news/read/2014/07/24/152305/2647298/10/posisi-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-rangking-108-dari-187-

Friedman, john, 1992, *empowerment : the politics of alternative development*, Blackwell book, Cambridge Mass

Henry, Nicholas, 1988, *Administrasi Negara Dari Masalah-Masalah Kenegaraan* Diterjemahkan Oleh Luciana D. Lontoh, Rajawali Jakarta

<http://anditenrysanna88.wordpress.com/2012/10/17/tantangan-dan-peluang-mdg-konteks-indonesia-serta-swot-analysis-approach-pendekatan-analisis-swot-pada-tujuan-1-menanggulangi-kemiskinan-dan-kelaparan/>

<http://admneg08029.blogspot.com/2010/10/pengertian-administrasi-publik-menurut.html> Diposkan 10th October 2010 oleh EJI, diakses kamis, 2 Juli 2015

<http://bambang-rustanto.blogspot.com/2010/04/kemiskinan-dalam-perspektif-pekerjaan.html> diakses kamis, 2 Juli 2015

http://ryoshiromibu.blogspot.com/2013/01/delapan-tujuan-mdgs_millenium_4557.html diakses kamis, 24 januari 2015

<https://wild76.wordpress.com/2008/08/25/sekilas-tentang-perencanaan-program/> diakses 15 juli 2014 pukul 13:30

id.m.wikipedia.org/wiki/kemiskinan. diakses 15 juli 2014 pukul 14:30

Jurnal Agroforestri Volume VI Nomor 2 Juni 2011, BPS. 2009. *Kemiskinan Di Provinsi Maluku 2009*. Di ambil dari <http://maluku.bps.go.id/file/produk88>. diakses 15 juli 2014 pukul 14:46

Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink dan Sari Wahyuni, *Metodologi penelitian, panduan untuk Master dan Ph.D. di bidang Manajemen*, Penerbit Salemba Empat 2011 Jln Raya Lenteng Agung no 101 Jagakarsa, Jakarta 12610

Haq, Mahbub Ul (1995), *Reflections on Human Development*, New York: Oxford University Press

Kartasasmita, Ginanjar, 1993, *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*, kerjasama Bappenas dengan Lembaga Penerbitan FIA UNIBRAW.

_____, 1997, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jakarta Pustaka LP3ES Indonesia

kbbi.web.id/miskin, diakses 15 juli 2014 pukul 14:30

Keputusan Walikota Batu, 2014, tentang *Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014*, nomor : 180/148/KEP/422.012/2014

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online)

Vol. 6, No. 1, 2016

Kusnadi Drs.,M.A. *Akar Kemiskinan Nelayan* Cetakan : September 2003, Penerbit LKiS Yogyakarta, Salakan baru no:1 sewon bantul. Jl. Parangtritis Km.4.4 Yogyakarta telp./fax. :0274-419924 Email: elkis@indosat.net.id

m.energituday.com/2014/01/03/angka-kemiskinan-indonesia-melonjak/ diakses senin, 13 oktober 2014, pukul 11 :55

m.antaranews.com/berita/441889/bps-jumlah-penduduk-miskin-2828-juta-orang. diakses senin, 13 oktober 2014 , pukul 07:53

Neuman, W., Lawrence, 1994, *Social research methods : qualitative and quantitative approaches*, 2nd edition, by allyn and bacon, a division of simon & Schuster,inc. 160 Gould street , Needham Heights, Massachusetts 02194

Ninik Sudarwati, Dra.,MM. *Kebijakan pengentasan kemiskinan – mengurangi kegagalan penanggulangan kemiskinan*, april 2009. Intimedia, wisma kali metro, jl. Joyo suko metro no 42 Merjosari malang . Instrans_malang@yahoo.com

Phillip Kotler, *Marketing Management*, 11th edition, 2003 By Pearson Education,inc., Upper Saddle River, New Jersey 07458

Satterthwaite, David (1997), “*Urban Poverty: Reconsidering its Scale and Nature*”, IDS Bulletin, Vol.28,

Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta Bandung, Email : alfabeta, Telp. 022-2008822

Suharto, Edi, Phd., 2009, *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia- Menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan*, Penerbit : Alfabeta,CV , Bandung , Email : alfabeta, Telp. 022-2008822, Cetakan pertama mei 2009

_____, 2002, *Human Development and The Urban Informal Sector in Bandung: The Poverty Issue*, International Journal, New Zealand Journal of Asian Studies, December special edition

_____, 2004, *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*, Bandung: STKSPress

_____, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT Rineka Aditama.

S. Nasution, Prof.DR.MA , *Metode research (penelitian Ilmiah)* Penerbit PT Bumi Aksara , cetakan ke 13, edisi juni 2012 Jl. Sawo raya no 18 Jakarta 13220

Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan masyarakat dan JPS*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suprihanto, John, Dr. MIM., Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM, http://hpm.fk.ugm.ac.id/hpmlama/images/Blok_III/Sesi_1_Blok_III.pdf diakses Kamis, 2-7-2015, pukul 15.00 WIB

Tarigan, Robinson, 2004, *Perencanaan Pembangunan Wilayah Jakarta* CV Haji Masagung

Yunus,Muhammad , *Bank kaum miskin (banker to the poor: micro-lending and the battle against world poverty)*, diterjemahkan oleh : Irfan Nasution Depok: marjin kiri, Cetakan ke 4, april 2008. Perumahan poin mas E1/9, Rangkapan Jaya, Depok 16435